



JPU Ungkap Gidot Minta Uang Pada Dua Kadis



TRIBUN/DYJ

SAKSI - Sidang lanjutan pidana kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, di PN Tipikor Pontianak, Senin (25/11). Sidang lanjutan ini beragendakan pemeriksaan empat orang saksi.

PONTIANAK, TRIBUN - Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Pontianak menggelar sidang kedua kasus korupsi yang menyeret Bupati Bengkayang Suryatman Gidot. Persidangan digelar Senin (25/11) di PN Tipikor Jl Uray Bawadi.

Sidang yang berlangsung dengan agenda mendengar saksi-saksi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Feby D, menerangkan ada empat saksi yang dihadirkan pada persidangan tersebut. Di an-

taranya, Obaja selaku Sekda Bengkayang, Marsidin selaku satu di antara Kabag di Bappeda Bengkayang, Dr Yan selaku Kadis PUPR Bengkayang, dan Martinus Suwandi satu di antara Kasie di PUPR Bengkayang.

Ia mengatakan, dari fakta persidangan, terungkap perencanaan permintaan sejumlah uang oleh Bupati Suryatman Gidot kepada Kadis PUPR dan Kadis Pendi-

■ Bersambung ke hal. 7



JPU Ungkap Gidot Minta Uang

Sambungan Hal.1

dikan dan Kebudayaan Bengkayang, dengan menjanjikan akan mendapat penambahan dana APBD ke dinas tersebut.

"Jadi tadi terungkap dalam persidangan bahwa Kadis PUPR dan Kadis Pendidikan dimintai untuk mengumpulkan uang sejumlah Rp 1 miliar yang nantinya kedua dinas tersebut akan dijanjikan untuk penambahan dana di APBD. Masing-masing untuk PUPR sebanyak Rp 7,5 miliar dan Dinas Pendidikan sebanyak Rp 6 miliar," ujar Feby.

Namun, lanjut dia, dalam pelaksanaannya ternyata Kadis Pendidikan berupaya menghindar untuk tidak memenuhi permintaan dari bupati. Fakta di persidangan tadi, kata dia, belum dibuktikan bahwa Kadis Pendidikan memberikan uang kepada Bupati Suryatman Gidot. "Jadi pada awalnya itu permintaan bupati itu sebanyak Rp 1 miliar kebutuhannya. Dari penjelasan saksi, permintaan tersebut berkaitan karena adanya kasus yang sedang diperiksa di Polda Kalbar. Namun kita tidak mengetahui untuk apa dana tersebut. Alasan bupati kan dari keterangan saksi tadi untuk solusi pada kasus yang sedang ditangani oleh Polda," katanya.

"Tapi inikan keterangan dari bupati. Marsini juga minta solusi, dirapatkan pada 30 Agustus ada permintaan dari bupati tersebut. Tapi tidak jelas. Entah akal-akalan bupati namun yang jelas itu bupati mengatakan demikian," sambung Feby.

Kabid Humas: Ser-takan Bukti

Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go, yang dihubungi tadi malam mengatakan, keterangan serupa pernah dikemukakan Jaksā Penuntut Umum (JPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Kombes Pol Donny Charles Go, menegaskan silakan saja ungkap dan dalam setiap fakta persidangan yang ada sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh para tersangka. "Kami dari Polda Kalbar mempersilakan untuk mengungkapkan dan mendalami setiap fakta yang ada di persidangan. Terkait perkataan Pak Gidot pada JPU KPK tentang kasus itu silakan dalam sejauh mana kebenarannya," tegas Kombes Pol Donny Charles Go saat diwawancara, Senin malam (25/11).

Ia menegaskan apabila tidak ada bukti yang kuat terkait pernyataan bahwa Gidot mengumpulkan uang untuk mengamankan kasus yang tengah ditangani Polda Kalbar, maka pihaknya meminta harus diproses dan ditindak tegas karena memberikan keterangan palsu.

Kombes Pol Donny Charles Go, meminta setiap fakta persidangan yang disampaikan para tersangka harus disertai dengan bukti-bukti sebelum itu dibuka pada publik. "Kami dari Polda Kalbar memang tidak mengikuti proses persidangan, tapi lebih baik pengakuan sepihak para tersangka ini harus disertai bukti-bukti. Jangan sampai

menciderai profesionalisme penyidik yang sudah berusaha maksimal dalam bekerja. Jelas ini dapat menyudutkan Polda Kalbar," tambahnya.

Sejauh ini, Kabid Humas Polda Kalbar yang juga mantan Kapolres Sanggau ini menegakkan kasus yang ditangani Polda Kalbar terkait penyaluran Dana Bantuan Khusus (Bansus) Desa dari BPKAD Kabupaten Bengkayang yang masih terus berproses dan tidak berhenti. "Kasus korupsi Bansus BKAD Kabupaten Bengkayang statusnya sudah pada tingkat penyidikan. Ditreskrimsus juga sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus ini dan berpeluang jumlah tersangka akan bertambah" jelasnya. Masyarakat dimintanya jangan meragukan integritas dan profesional Polda Kalbar dalam menjalankan tugas.

Sintje Kurniawati, pengacara terdakwa Rodi, menilai persidangan kedua yang digelar oleh PN Tipikor memuaskan bagi pihaknya. Ia mengatakan, dari keempat saksi yang dihadirkan memberikan keterangan bahwa mereka tidak tahu agenda atas permintaan yang diduga untuk bupati. Khususnya terhadap kliennya tersebut. "Dari keempat saksi ini hanya pak Martinus yang mengenali, dan itu pun hanya mengenal sepintas karena pernah mengerjakan proyek senilai Rp 700 juta dan itu sistemnya bukan PL (penunjukkan langsung-Red)," ujarnya ditemui usai persidangan, Senin (25/11). (gam/oni)